

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana aktivitas ekonomi pada suatu masyarakat berkembang dan mengakibatkan peningkatan produksi barang dan jasa yang pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.² Dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan adanya pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata.³ Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya. Maka tidak mengherankan apabila pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama keberhasilan dalam pembangunan ekonomi.

Menurut Lincolin Arsyad, pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai peningkatan nilai Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto, tanpa mempertimbangkan apakah pertumbuhan tersebut lebih tinggi atau lebih rendah daripada pertumbuhan jumlah penduduk, atau apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonomi atau tidak.⁴ Sedangkan menurut Mankiw salah satu

² Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2019) hal. 10

³ Khusni Aristina, Whinarko Juliprijanto, dan Panji Kusuma Prasetyanto, "Analisis Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2005-2018" dalam untidar.ac.id, diakses 21 Oktober 2023

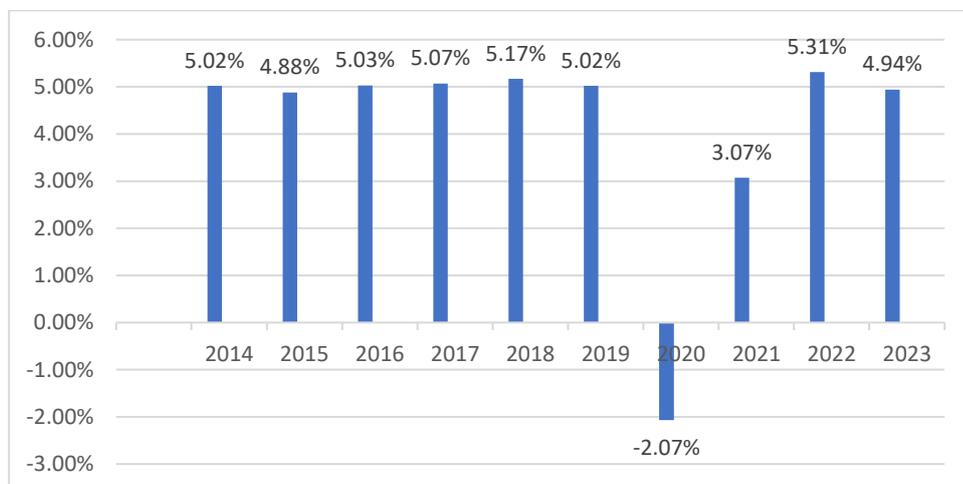
⁴ Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*: Edisi keempat, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), hlm. 13

variabel tolak ukur kemajuan negara adalah pertumbuhan ekonomi. Jika suatu negara memiliki perekonomian yang stabil dapat dikatakan bahwa negara tersebut maju. Sedangkan negara yang memiliki perekonomian terpuruk maka negara tersebut belum dikatakan sebagai negara maju.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014-2023 bersifat fluktuatif. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak selalu mengalami peningkatan dan perkembangan. Berikut ini grafik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2014-2023:

Grafik 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2014-2023 (% Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia bersifat fluktuatif. Pada tahun 2014 dan 2015 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan masing-masing menjadi 5.02% dan 4.88%.

⁵ N. Gregory Mankiw, Euston Quah, Peter Wilson, *Pengantar ekonomi makro edisi asia jilid 2*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014) hal. 203

pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan lagi pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 5.03% dan 5.07%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,71% turun menjadi 5.02% pada tahun 2019. Kemudian pertumbuhan ekonomi kembali menurun pada tahun 2020 hingga menyentuh angka -2.07%. tahun 2020 menjadi nilai pertumbuhan ekonomi paling rendah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara luas.

Pandemi ini mengakibatkan pembatasan pergerakan, penutupan bisnis, pengurangan produksi, dan penurunan konsumsi masyarakat. Pembatasan pergerakan mempengaruhi perilaku konsumen. Masyarakat lebih mengutamakan membeli kebutuhan dasar dan mengurangi pembelian barang dan jasa non-esensial. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa menurun. Dampak dari hal tersebut adalah perusahaan akan mengurangi jumlah produksi karena adanya kelebihan pasokan atau kurangnya permintaan. Penurunan jumlah produksi akan mengakibatkan menurunnya pendapatan perusahaan. Dampak-dampak tersebut secara keseluruhan dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang negatif atau melambat. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang melakukan pembatasan pergerakan di tahun 2020 dan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada -2.07%

Adanya pandemi COVID-19 memberikan tantangan bagi perekonomian Indonesia dan pemerintah untuk menyusun kebijakan ekonomi dengan penuh kehati-hatian sehingga mampu memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan mengatasi dampak yang diakibatkan. Sesuai dengan grafik 1.1 pada halaman

sebelumnya pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mulai membaik walaupun belum stabil seperti tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 sebesar 3.7%. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai pulih dan bangkit dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5.31%. Hingga Triwulan-III tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 4,94. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih mengalami fluktuasi.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja. Akan tetapi banyak faktor yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah kebijakan pemerintah.⁶ Pemerintah harus mampu menyusun kebijakan yang tepat guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang.

Keynes menyebutkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan produksi barang dan jasa melalui dua jenis kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.⁷ Teori Keynes menyatakan bahwa ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, hal ini dapat berkontribusi secara positif terhadap peningkatan produksi dalam perekonomian, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.⁸ Dalam hal ini pengeluaran pemerintah diatur dalam kebijakan fiskal.

⁶ Zakik, "Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap Tingkat Pendapatan Perkapita", *Jurnal*, (8) 1, 59 – 70 (Madura: Media Trend, 2014) hal. 59

⁷ John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money* (London: Macmillan, 1936), hal.20

⁸ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi III* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Kebijakan fiskal adalah strategi ekonomi yang bertujuan memperbaiki kondisi perekonomian dengan mengubah pendapatan dan pengeluaran pemerintah.⁹

Ada dua instrumen utama dalam kebijakan fiskal, yaitu pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak.¹⁰ Teori Keynes menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki potensi untuk meningkatkan produksi dalam ekonomi sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pungutan pajak oleh pemerintah dapat memiliki efek negatif. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal memiliki kemampuan untuk berkontribusi positif atau negatif terhadap ekonomi, tergantung pada alat kebijakan yang diterapkan.¹¹ Hal ini sejalan dengan teori Solow Swan yang juga menyatakan pengeluaran pemerintah dapat memainkan peran dalam pertumbuhan ekonomi. Misalnya, investasi pemerintah dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan dapat meningkatkan modal fisik dan manusia dalam ekonomi.

Salah satu strategi dalam kebijakan fiskal adalah peningkatan pengeluaran pemerintah (ΔG) dengan tujuan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Instrumen pengeluaran pemerintah dapat berupa pemberian subsidi, pemberian modal kerja pada masyarakat, peningkatan belanja untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, pasar, dan sarana lainnya. Sedangkan, instrumen pajak yang dapat digunakan untuk

⁹ Khairul Amri, "Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Bukti Data Panel di Indonesia" *Al-Mashrif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 8 (1), 1-18, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020) hal. 2

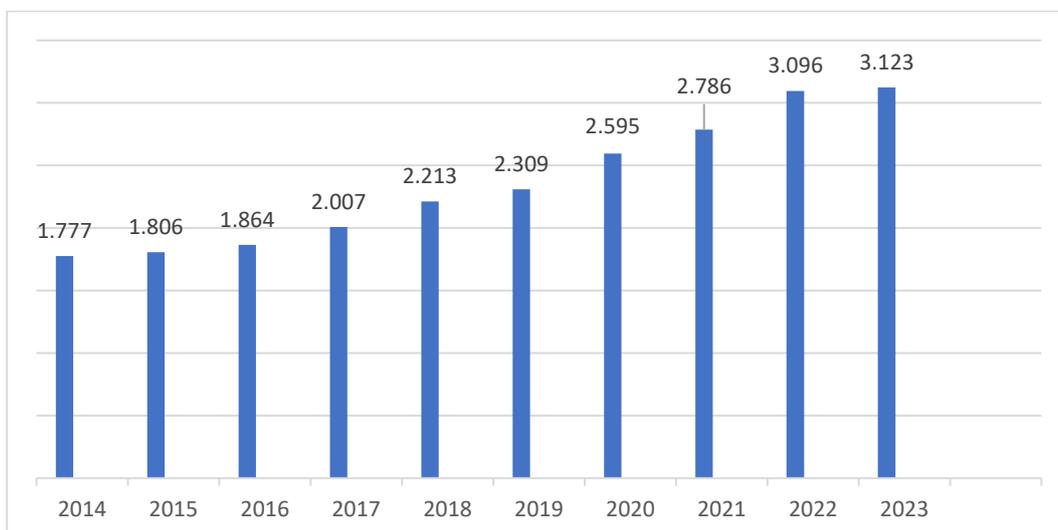
¹⁰ N. Gregory Mankiw, *Macroeconomics Fifth Edition*. (New York: Worth Publisher, 2003)

¹¹ Eros, A. Long run growth effects of fiscal policy: A case study of Hungary, *Club of Economics in Miskolc*, 5(1), 11-17.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan memberikan insentif pajak berupa penurunan tarif, bea masuk, penurunan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan pembebasan pajak pada area wilayah tertentu guna mendorong iklim investasi pada wilayah tersebut.¹² Perkembangan kebijakan fiskal di bidang pengeluaran pemerintah dapat dilihat melalui grafik perkembangan pengeluaran pemerintah berikut.

Grafik 1.2

Pengeluaran Pemerintah Indonesia periode 2014-2023 (Triliun Rupiah)



Sumber : Bank Indonesia, 2023

Grafik 1.2 menunjukkan tren pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan karena dipengaruhi berbagai faktor antara lain: terjadi peningkatan jumlah penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi,

¹² Ahmad Nawawi dan Ferry Irawan, “Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 10 (2), 159-174 (Depok: Universitas Indonesia, 2010), hal. 160

peningkatan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan aktivitas-aktivitas lain yang memerlukan pendanaan dari APBN.

Menurut Teori Peacock dan Wiseman, pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan peningkatan pemungutan pajak. Ketika perekonomian tumbuh, pendapatan individu dan perusahaan juga cenderung akan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan ini, pemerintah biasanya akan mendapatkan lebih banyak penerimaan pajak karena pendapatan individu dan perusahaan yang lebih tinggi akan menghasilkan lebih banyak pajak pendapatan dan lainnya. Peningkatan penerimaan pajak ini akan berdampak pada peningkatan pengeluaran pemerintah. Hal ini akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) akan menyebabkan pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang lebih besar. Dengan demikian, apabila ada peningkatan dalam pengeluaran pemerintah, termasuk baik belanja langsung maupun tidak langsung, hal tersebut akan berkontribusi pada pertumbuhan PDB.

Namun, berbeda halnya jika negara mengalami defisit anggaran maka pemerintah akan memberlakukan kebijakan fiskal ketat (*Tight Fiscal Policy*). *Tight Fiscal Policy* seringkali ditandai dengan pengurangan pengeluaran pemerintah dan peningkatan pendapatan pajak. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan tarif pajak, mengurangi insentif pajak, atau menyesuaikan struktur pajak untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan fiskal. Jika pemerintah meningkatkan

pajak, hal ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan investor. Peningkatan pajak dapat mengurangi pendapatan yang tersedia bagi konsumen untuk menghabiskan atau menabung, sehingga dapat menekan konsumsi dan investasi. Penurunan konsumsi dan investasi ini bisa menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Tindakan pemerintah untuk meningkatkan pajak atau mengurangi pengeluaran bisa berdampak pada tingkat suku bunga. Jika kebijakan fiskal ketat mengurangi pengeluaran secara signifikan, hal ini dapat menurunkan permintaan agregat dalam ekonomi. Untuk menstimulasi ekonomi, bank sentral dapat mencoba menurunkan suku bunga agar mendorong pinjaman dan investasi, atau meningkatkan likuiditas dalam perekonomian. Jika suku bunga turun sebagai respons terhadap kebijakan fiskal ketat, ini dapat mendorong keputusan investasi, karena biaya pinjaman menjadi lebih murah bagi perusahaan. Dalam konteks perbankan, penurunan suku bunga dapat mengurangi biaya pembiayaan yang dikenakan kepada perusahaan atau individu yang meminjam dana dari bank. Penurunan suku bunga dalam bank dapat berdampak positif pada biaya pembiayaan yang lebih rendah bagi peminjam. Biaya pinjaman yang lebih rendah dari bank dapat merangsang kegiatan investasi perusahaan. Perusahaan dapat lebih termotivasi untuk mengambil pembiayaan dari bank syariah untuk ekspansi usaha, pengembangan proyek baru, atau kegiatan investasi lainnya.

Berikut perkembangan penerimaan pajak di Indonesia dalam kurun waktu 2014-2024 :

Grafik 1.3**Penerimaan Pajak Indonesia periode 2014-2023 (Triliun Rupiah)**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

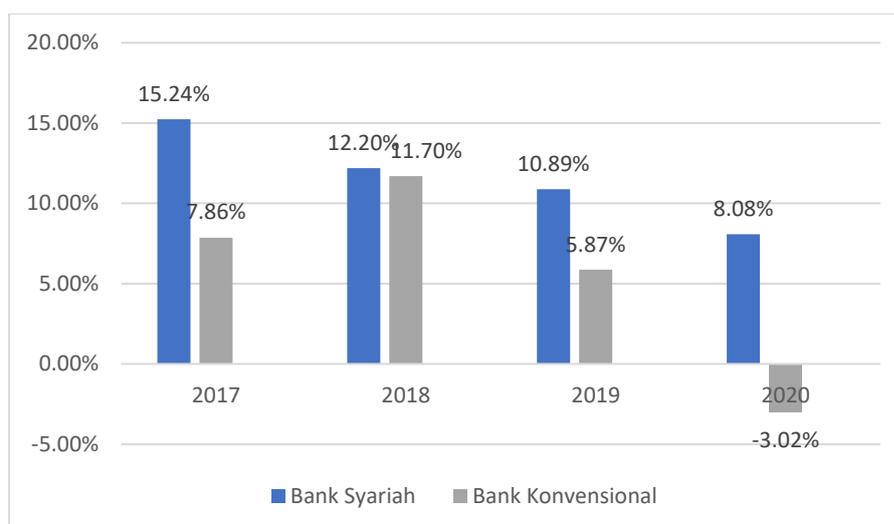
Pada grafik 1.3 dapat dijelaskan bahwa tren penerimaan pajak di Indonesia selama kurun waktu penelitian bersifat fluktuatif. Penerimaan perpajakan selalu mengalami kenaikan dalam kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2019. Namun, penerimaan perpajakan mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena kontraksi ekonomi di sepanjang 2020. Selain itu, insentif yang diberikan pemerintah kepada seluruh dunia usaha juga mengakibatkan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Sektor perbankan juga memainkan peran penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan sektor keuangan dan perbankan yang positif akan berkorelasi secara positif dengan kinerja ekonomi suatu negara. Sektor keuangan dan perbankan dapat menjadi salah satu pendorong utama

pertumbuhan sektor riil ekonomi.¹³ Sistem perbankan, melalui kebijakan pembiayaan yang disalurkan ke sektor ekonomi, berperan sebagai fondasi bagi terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sistem perbankan, melalui kebijakan pembiayaan yang diberikan, memiliki karakteristik serupa dengan pengeluaran pemerintah, terutama dalam kemampuannya untuk meningkatkan sisi permintaan, sehingga merangsang peningkatan pendapatan nasional atau output.

Grafik 1.4

Pertumbuhan Kredit/Pembiayaan (%)



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Di tengah masa pandemi covid-19 kinerja intermediasi bank syariah justru lebih berdaya tahan daripada bank konvensional. Sepanjang tahun 2020, laju pertumbuhan pembiayaan bank syariah mencapai 8,08% lebih baik dibandingkan pertumbuhan kredit bank konvensional yang justru berkontraksi

¹³ Ade Ananto Terminanto, "Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pembiayaan Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Data Panel Provinsi di Indonesia", *Jurnal Istishadia*, 10 (1), 97-129, (Jakarta: UIN Jakarta, 2017), hal. 100

minus 3,02%. Industri perbankan syariah dinilai lebih tahan krisis dibandingkan dengan perbankan konvensional jika kondisi ekonomi memburuk. Pasalnya, industri perbankan syariah lebih fleksibel dalam menghadapi situasi apapun. Prinsip dasar bank syariah yang mengedepankan konsep bagi hasil dalam akad penyaluran pembiayaan ataupun penempatan dana membuat potensi keuangan maupun risiko ditanggung oleh kedua pihak secara bersama-sama.

Prospek Perbankan Syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan positif yang menjanjikan. Perbankan Syariah menjadi salah satu sektor industri baru yang menarik minat secara signifikan. Fenomena ini tercermin dari bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah (BUS). Berikut adalah data perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2023.

Tabel 1.1
Perkembangan Bank Umum Syariah Tahun 2014-2023

Tahun	Bank Umum Syariah
2014	12
2014	12
2015	12
2016	13
2017	12
2018	14
2019	14
2020	14
2021	15
2023	13

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Dari data tabel 1.1 terlihat bahwa perkembangan Bank Syariah di Indonesia mengalami peningkatan dalam hal jumlah lembaga perbankan yang mengalami pertumbuhan. Ini menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah di

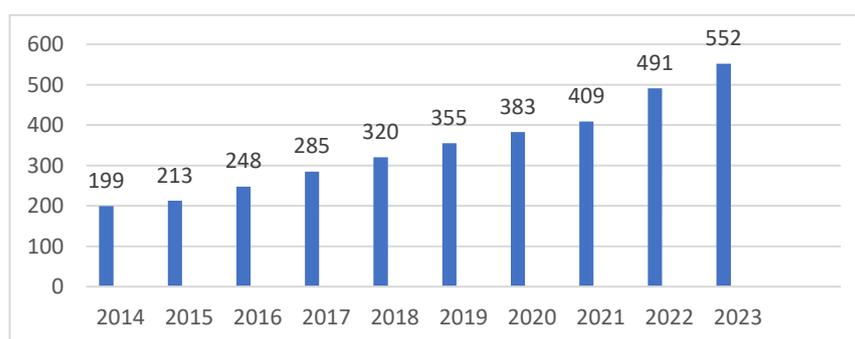
Indonesia semakin memperkuat sistem keuangan negara, menggambarkan peran yang semakin kuat dalam struktur keuangan Indonesia.

Sektor perbankan menghimpun sebagian besar dana dari rumah tangga, yang kemudian dialokasikan ke beberapa proyek yang layak. Perbankan syariah sebagai lembaga intrmediasi menawarkan produk dan layanan keuangan yang relatif sama dengan sistem konvensional, namun terdapat perbedaan pada prinsip syariahnya. Bank Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dalam transaksinya tidak mengandung unsur riba, maysir dan gharar. Salah satu produk layanan yang diberikan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan dalam bank syariah terbagi berdasarkan akadnya yaitu akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istisna dan salam.

Berikut ini disajikan grafik total pembiayaan Bank Syariah di Indonesia tahun 2014 hingga 2023.

Grafik 1.5

Total Pembiayaan Bank Umum Syariah (Miliar Rupiah)



Sumber : Bank Indonesia, 2023

Perkembangan positif bank syariah di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir termanifestasi melalui peningkatan yang konsisten dalam total pembiayaan setiap tahunnya. Fenomena ini mencerminkan peningkatan

kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesadaran masyarakat terhadap keharaman riba dan peningkatan kinerja bank syariah, yang membuatnya mampu bersaing dengan bank konvensional melalui variasi produk yang ditawarkan. Grafik di atas menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki keberlanjutan eksistensi dalam menghadapi fluktuasi ekonomi, meskipun menghadapi tantangan sumber daya manusia, produk, pembiayaan, dan permodalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Muazi dan Fitri Arianti dengan judul "Analisis Pengaruh penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi: di Jawa Tengah 1990-2010" menyatakan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terdapat pada konsumsi, belanja pemerintah, ekspor, dan investasi yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mempertahankan stabilitas ekonomi suatu negara, negara harus menjaga konsistensi dalam meningkatkan tingkat konsumsi, belanja pemerintah, ekspor, dan investasi yang berada di dalamnya.¹⁴

Sedangkan menurut Ade A Terminanto pada penelitiannya tahun 2017 menyatakan belanja negara memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti jika ada peningkatan dalam belanja pemerintah, negara akan mengalami defisit. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan dana

¹⁴ Nur M Muazi dan Fitri Arianti, "Analisis Pengaruh penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi: di Jawa Tengah 1990-2010", *Diponegoro Jurnal of Economics*, 2 (1), 1-9, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014), hal. 4

negara untuk kegiatan ekonomi belum optimal, mungkin disebabkan oleh potensi penyalahgunaan dana yang terjadi akibat kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah.¹⁵

Antara pembiayaan Bank Syariah memiliki hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa dana dari pihak ketiga serta pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh yang dimaksud adalah bahwa nilai investasi yang didapatkan dari pembiayaan bank syariah akan menambahkan jumlah lapangan usaha, sehingga nilai pertambahan sektor riil akan semakin meningkat dengan bertambahnya nilai usaha yang diperoleh. Temuan ini sejalan dengan salah satu hipotesis teori Schumpeter yang menyatakan bahwa sektor perbankan syariah memicu pertumbuhan ekonomi sektor riil di Indonesia. Meskipun demikian, studi yang dilakukan oleh Putra pada tahun 2018 menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, variabel lain seperti total aset, pembiayaan perbankan syariah, kredit konvensional, dan nilai APBD terbukti signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Tetapi penelitian lain menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Afandi & Amin pada tahun 2019 pada penelitiannya yang berjudul "Islamic Bank Financing and Its Effects on

¹⁵ Ade Ananto Terminanto, "Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pembiayaan Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Data Panel Provinsi di Indonesia", *Jurnal Istishadia*, 10 (1), 97-129, (Jakarta: UIN Jakarta, 2017), hal. 109

Economic Growth : A Cross Province Analysis.”¹⁶ Dengan demikian, hasil penelitian menyoroti bahwa kehadiran perbankan syariah di Indonesia belum memberikan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang perbedaan hasil penelitian terdahulu, untuk memastikan teori yang sudah ada maka penulis bermaksud untuk menguji kembali bagaimana **”Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Peran Perbankan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi”**

B. Identifikasi Masalah

Untuk menghindari meluasnya penyimpangan terhadap masalah yang akan dibahas, maka peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak Indonesia mengalami ketidakstabilan peningkatan dan penurunan dari 2014 sampai 2023. Dari fluktuasi tersebut setidaknya memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan dan penurunan pajak ini memberikan pengaruh pada perbankan khususnya pada sektor pembiayaan.
2. Pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan dan penurunan dalam jumlahnya. Hal tersebut akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga memberikan pengaruh pada sektor perbankan.
3. Perkembangan penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah mengalami fluktuasi dari tahun 2014 hingga 2023. Hal ini tentu saja dipegaruhi oleh

¹⁶ Muhammad Anif Afandi. dan Muhammad Amin (2019). Islamic Bank Financing and Its Effects on Economic Growth : A Cross Province Analysis. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 8(2),43–250.

beberapa faktor. Fluktuasi peyaluran pembiayaan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penyaluran pembiayaan yang rendah atau fluktuatif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan dana yang terbatas dapat memperlambat investasi, pengembangan proyek infrastruktur, dan pengeluaran konsumen

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran umum di atas terkait “Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Peran Perbankan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi” maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pajak mempengaruhi peran perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah pengeluaran pemerintah mempengaruhi peran perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah pembiayaan mempengaruhi peran perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi?
4. Apakah tingkat pajak, pengeluaran pemerintah, dan pembiayaan secara simultan mempengaruhi peran perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pajak mempengaruhi peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi

2. Untuk mengetahui bagaimana pengeluaran pemerintah mempengaruhi peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi
3. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan dalam mempengaruhi peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi
4. Untuk mengetahui bagaimana pajak, pengeluaran pemerintah, dan pembiayaan mempengaruhi peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap peran perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi lembaga yang diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan saran, pemikiran, informasi yang dapat digunakan sebagai masukan yang berguna dalam menerapkan kebijakan fiskal ataupun kebijakan bank untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

b. Bagi pihak akademik

Hasil dari penelitian ini dapat menambah kepustakaan UIN Sayyid Ali Rahmtullah Tulungagung untuk dijadikan referensi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademis

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa untuk menambahkan informasi, serta bahan perbandingan dan juga untuk referensi bagi peneliti selanjutnya dengan tema maupun judul penelitian yang relevan

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Adanya ruang lingkup dan keterbatasan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa luas cakupan pembahasan dan menghindari tidak terkendalinya baasan masalah yang berlebihan dalam penelitian ini.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisa dampak kebijakan fiskal dan peran perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Variabel X sebagai variabel bebas (*independen*) terdiri dari X_1 (pajak), X_2 (pengeluaran pemerintah), X_3 (pembiayaan bank syariah) dan variabel Y sebagai variabel terikat (*dependen*) yaitu Produk Domestik Bruto (PDB).

2. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya dibatasi pada variabel pajak, pengeluaran pemerintah, pembiayaan bank syariah dan Produk Domestik Bruto (PDB)

Penelitian ini juga melakukan pembatasan periode waktu yang ditetapkan yaitu hanya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2023.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam skripsi merujuk pada penjelasan atau definisi yang diberikan terhadap istilah-istilah khusus, istilah teknis, atau konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembaca memahami secara jelas makna istilah-istilah tersebut sesuai dengan penggunaannya dalam konteks skripsi.

1. Definisi Konseptual

a. Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal merupakan serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran keuangan negara untuk memengaruhi perekonomian suatu negara atau wilayah tertentu. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk mengatur aktivitas ekonomi melalui pengeluaran pemerintah dan sistem pajak dengan tujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pembangunan yang merata.

b. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merujuk pada total pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dari berbagai jenis pajak yang dikenakan pada pendapatan individu, perusahaan, transaksi ekonomi, atau komoditas tertentu. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi

pemerintah untuk membiayai berbagai program, layanan publik, infrastruktur, serta operasional pemerintah.

c. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merujuk pada total belanja atau pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai sektor dan program. Ini mencakup semua pembayaran dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai operasional, layanan publik, investasi, subsidi, bantuan sosial, proyek infrastruktur, pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program lainnya.

d. Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan bank syariah merujuk pada proses pengumpulan dana dan penyaluran kredit oleh bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek-etis, sosial, dan keadilan dalam transaksi keuangannya.

2. Definisi Operasional

a. Kebijakan fiskal

Definisi operasional dari kebijakan fiskal adalah penguraian atau penjabaran konkret dari konsep kebijakan fiskal ke dalam langkah-langkah atau variabel-variabel yang dapat diukur atau diamati dalam situasi praktis atau penelitian. Ini melibatkan penjelasan yang lebih terinci tentang bagaimana kebijakan fiskal diimplementasikan dalam praktiknya, seperti bagaimana pemerintah

mengatur pendapatan dan pengeluarannya melalui instrumen-instrumen seperti pajak, pengeluaran pemerintah, serta pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi secara keseluruhan.

b. Penerimaan Pajak

Definisi operasional dari penerimaan pajak adalah penjabaran konkret dari konsep penerimaan pajak ke dalam serangkaian tindakan atau proses yang dapat diukur dan diamati dalam konteks praktis atau penelitian. Hal ini meliputi segala bentuk pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dari berbagai jenis pajak yang dikenakan pada pendapatan individu, perusahaan, transaksi ekonomi, atau aspek tertentu dalam masyarakat.

c. Pengeluaran Pemerintah

Definisi operasional dari pengeluaran pemerintah adalah penjabaran praktis dari konsep pengeluaran pemerintah ke dalam tindakan atau kegiatan yang dapat diukur dan diamati dalam konteks nyata atau penelitian. Ini merujuk pada segala bentuk pembayaran atau pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program, layanan publik, infrastruktur, dan operasional pemerintah. Definisi operasional ini mencakup langkah-langkah konkret yang melibatkan penggunaan dana dari anggaran pemerintah, alokasi sumber daya ke sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan publik lainnya.

d. Pembiayaan Bank Syariah

Definisi operasional dari pembiayaan bank syariah adalah penjabaran konkret dari konsep pembiayaan yang dilakukan oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ke dalam serangkaian kegiatan atau mekanisme yang dapat diukur dan diamati dalam konteks praktis atau bisnis. Ini mencakup proses dan praktik konkret yang dilakukan oleh bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, dan lainnya. Definisi operasional ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana bank syariah mengumpulkan dana dan menyalurkannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), unsur spekulasi, dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram.

H. Sistematika Pembahasan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara isi dari sisi skripsi, yaitu suatu gambaran analisis skripsi secara keseluruhan dan dari sistematika itulah dapat dijadikan suatu arahan bagi pembaca untuk menelaah secara urutan terdapat tiga bagian dalam sistematika penulisan skripsi yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman skripsi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman skripsi. Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal

berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional, sistematika skripsi.

BAB II Landasan Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian. BAB III Metodologi Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengukuran dan instrument penelitian, serta teknik analisis data

BAB IV Pembahasan hasil penelitian. Terdiri dari gambaran umum objek riset, profil responden, analisis data dan uji hipotesis.

BAB V Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan